



Membangun perencanaan wilayah partisipatif di Kabupaten Aceh Barat

Oleh Feri Johana, Andree Ekadinata, Dewi Sonya

Perencanaan wilayah, mengapa perlu?

"Jangankan berpikir perencanaan partisipatif, ke daerah ini (desa: red) pun kami belum pernah, nampaknya mulai saat ini kami bisa belajar dan memulai perencanaan yang bersifat partisipatif", seloroh salah satu peserta kegiatan perencanaan partisipatif yang diselenggarakan oleh ICRAF.

Perencanaan wilayah merupakan sebuah upaya untuk mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang tersebut. Tanpa ada perencanaan yang melibatkan masyarakat hanya akan menempatkan masyarakat sebagai penonton dan tidak dapat menentukan masa depan atas pengelolaan wilayahnya sendiri. Masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mengadaptasi terhadap kenyataan ruang yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan sangat mungkin akan menentang terhadap tata ruang yang sudah dibuat.

Perencanaan wilayah konvensional yang sebelumnya diterapkan secara umum di lembaga pemerintahan disusun oleh pemerintah, khususnya pihak-pihak tertentu yang dianggap bertanggung jawab. Penyusunan perencanaannya pun menggunakan standar ilmiah yang baku sehingga masyarakat secara umum dianggap tidak mampu untuk membuatnya. Namun pada beberapa waktu terakhir ini, paradigma baru mengenai

perencanaan wilayah sudah mulai dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat atau sering dikenal dengan perencanaan wilayah secara partisipatif. Peran masyarakat dalam perencanaan wilayah cukup berarti karena dikemudian hari masyarakatlah yang lebih banyak ikut terlibat langsung dalam pemanfaatan ruang di suatu wilayah.

Dengan demikian, perencanaan model partisipatif ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyusunan, implementasi dan evaluasi perencanaan wilayahnya. ICRAF selaku lembaga penelitian telah melakukan serangkaian kegiatan bersama-sama pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mengembangkan metodologi yang mengintegrasikan perencanaan konvensional dan perencanaan partisipatif. Integrasi kedua metode perencanaan ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi *gap* (kesenjangan) yang menimbulkan inefisiensi dan ketidakberhasilan dalam pembangunan.

Sekilas mengenai kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat dengan luas wilayah 2.927,95 km² merupakan salah satu kabupaten di pesisir pantai barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka bencana tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004 lalu memberikan

dampak cukup besar di kabupaten ini. Dampak sosial ekonomi yang terjadi secara signifikan telah mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Pemanfaatan lahan pasca tsunami menjadi isu yang sangat penting dalam penataan dan pemulihan kembali Kabupaten Aceh Barat. Kawasan hutan primer seluas 136.390 Ha atau sekitar 46,58% dan perkebunan 49.224 Ha (RPJMD Aceh Barat, 2007) serta pemanfaatan lahan lainnya seperti pemukiman, sawah, ladang, tegalan dan semak belukar perlu ditata kembali agar memberikan manfaat bagi masyarakat baik manfaat langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan pembelajaran di tingkat masyarakat

Kegiatan pembelajaran di tingkat masyarakat dilakukan oleh ICRAF dengan melibatkan para peserta dari unsur badan dan dinas serta 90 orang warga masyarakat desa di Kabupaten Aceh Barat yang telah dipilih dan mendapatkan pembekalan teknis melalui beberapa pelatihan. Kegiatan ini ditujukan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan kegiatan perencanaan pembangunan wilayah pada tingkat kabupaten.

Pemetaan desa merupakan bagian penting yang dilakukan secara bersama-sama, antusiasme dan keingintahuan masyarakat dituangkan dalam coretan garis dan area yang



Gambar alur proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (*transect walk*, *household survey* dan *pemetaan partisipatif*)
(foto: Feri Johana)

menggambarkan desanya dan berbagai pemanfaatan lahan serta kondisi desanya. Adu pendapat merupakan ekspresi dari pemahaman masing-masing, sehingga pada akhirnya dapat terwujud sebuah hasil kolaborasi pemahaman terhadap desa secara bersama-sama.

Sebagian besar kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk menggali data desa dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta mengkolaborasikan pengetahuan dan kemampuan masyarakat desa dengan peserta dari lembaga pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yaitu Desa Tangkeh, Desa Deuah dan Desa Suak Nie. Secara topografi desa-desa tersebut mewakili daerah perbukitan, dataran dan pantai (*coastal area*). Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan hasil analisa data sekunder untuk melihat kelayakan pengembangan hasil pertanian dan perkebunan, dalam hal ini padi sawah dan karet sebagai komoditas unggulan kabupaten.

Pembelajaran dalam perencanaan wilayah partisipatif ini dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu:

(1) Pembekalan, dilakukan untuk menyegarkan kembali pemahaman para peserta mengenai materi-materi

tentang kegiatan transek (*transect activity*), survei rumah tangga (*household survey*), pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) dan analisa SWOT

(2) Berbagi pengalaman mengenai kegiatan serupa yang telah dilakukan oleh ICRAF di lokasi lain

(3) Penyusunan rencana kerja, dilakukan untuk mempermudah kegiatan di lapangan, sehingga ketika di lapangan permasalahan teknis sudah dapat dikurangi sekecil mungkin, serta pembagian tanggung jawab masing-masing peserta terhadap kegiatan

(4) Penelusuran transek (*transect walk*) untuk mengenali kondisi masing-masing desa serta mendata berbagai bentuk penggunaan lahan yang ada

(5) Survei rumah tangga (*household survey*) untuk mendokumentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa

(6) Diskusi kelompok yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat guna membangun kolaborasi masyarakat dalam melakukan pemetaan partisipatif dan melatih menyiapkan perencanaan desa menggunakan analisa kekuatan dan kelemahan.

Penutup

Kegiatan yang melibatkan masyarakat ini diharapkan menumbuhkan kesadaran peserta akan arti pentingnya aspirasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pada sisi lain masyarakat akan merasa diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam mengembangkan pemikiran dan harapannya mengenai desanya. Harapan lain adalah diperolehnya data lapangan yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh peserta dari dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangkaian proses belajar mengenai perencanaan bentang lahan yang integratif dan inklusif berdasarkan data dan informasi.

Terdapat dua pesan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dari kegiatan ini, yaitu:

1. Perencanaan partisipatif merupakan sebuah kebutuhan dalam konteks perencanaan wilayah.
2. Diperlukan formula integrasi yang jelas dan disepakati oleh semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat.

Kedua pesan tersebut merupakan hal yang dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berdaulat bagi seluruh masyarakat.